

KODAM 4.0 (Kolaborasi Desa Adat, Karang Taruna, dan Pemda): Strategi Optimalisasi Potensi Kearifan Lokal Sasi sebagai *Branding* Provinsi Maluku guna Mensukseskan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional di Era Revolusi Industri 4.0

(KODAM 4.0 (Collaboration of Traditional Villages, Youth Organizations, and Local Government): Optimizing the Potential of Sasi Local Wisdom as Branding for Maluku Province to Succeed Maluku as a National Fish Barn in the Era Industrial Revolution 4.0)

Dita Formara Tuasikal¹, Tahir Tuasikal^{1,*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang

²Fakultas Perikanan, Universitas Darussalam Ambon. Jl. Waehakila Puncak Wara, Batu Merah, Ambon

*Email: tahertuasikal@yahoo.com

Abstract

There are 11 fisheries development areas (FDA) in Indonesia and 3 of them are in Maluku. Therefore, the Maluku Provincial Government has promoted a lighthouse project titled Maluku as the National Fish Barn (M-LIN). Over time, the ups and downs of integrated fisheries management through M-LIN have not yielded maximum results. This synthesis seeks to offer KODAM (Collaboration of Traditional Villages, Youth Organizations, and Local Governments) to make M-LIN a success. This collaboration is based on the implementation of "sasi" as local wisdom in Maluku. The proposed project will take place in three stages, starting from the implementation of special policies from the local government, followed by socialization to youth organizations and related elements, simultaneous implementation of sasi in several villages, publications, to evaluation of program success. The next stage is the analysis and improvement of KODAM activities in the first year. The hope is that the implementation of KODAM in the second year is more measurable, ideal and successful.

Keywords: KODAM, Local Wisdom, M-LIN, Sasi.

Abstrak

Terdapat 11 wilayah pengembangan perikanan (WPP) di Indonesia dan 3 di antaranya ada di Maluku. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Maluku telah menggalakkan proyek mercusuar bertajuk Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). Seiring berjalannya waktu, pasang surut pengelolaan perikanan terintegrasi melalui M-LIN belum membuahkan hasil yang maksimal. Sintesa ini berusaha untuk menawarkan KODAM (Kolaborasi Desa Adat, Karang Taruna, dan Pemda) untuk mensukseskan M-LIN. Kolaborasi ini berbasis pelaksanaan "sasi" sebagai kearifan lokal di Maluku. Proyek yang ditawarkan akan berlangsung tiga tahap, mulai dari pelaksanaan kebijakan khusus dari Pemda, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada Karang Taruna dan unsur terkait, pelaksanaan sasi secara serempak pada beberapa Desa, publikasi, hingga evaluasi keberhasilan program. Tahap berikutnya adalah analisa dan perbaikan terhadap aktifitas KODAM di tahun pertama. Harapannya adalah pelaksanaan KODAM di tahun kedua lebih terukur, ideal dan sukses.

Kata kunci: KODAM, M-LIN, Sasi, Sintesa

I. Pendahuluan

Beberapa tahun kedepan Indonesia akan dihadapkan pada bonus demografi yakni saat dimana jumlah masyarakat produktif lebih besar daripada yang non produktif sehingga diharapkan akan menjadi masa kejayaan Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia juga memasuki era revolusi industri 4.0 berbasis internet berpotensi menghilangkan pekerjaan-pekerjaan tertentu kemudian diganti dengan pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya (Satya, 2018). Kedua hal tersebut mampu berbuah manis sebagai peluang saat dimanfaatkan dengan bijak, namun juga sebaliknya dapat berbalik menjadi petaka saat tidak mampu dikelola dengan baik. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam serta melimpah namun pemanfaatannya masih banyak yang belum optimal, salah satunya pada sektor kelautan/keparitaman.

Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui *Convention on The Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,9 juta Km² yang terdiri dari 3,2 juta Km² perairan teritorial dan 2,7 juta Km² perairan ZEE. Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen. Hal inilah yang mengantarkan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas perairan berkisar 75% dari total wilayah Indonesia (Ali et al, 2021).

Pada tahun 2024 mendatang, *Food Agriculture Organization* (FAO) menyebut potensi pasar produk perikanan global mencapai 240 juta ton per tahun dan Indonesia berpotensi menguasai 25% dari potensi global. “Dengan asumsi produksi 60 juta ton per tahun, Indonesia berpotensi mendapatkan USD240 miliar per tahun dan membuka 30 juta lapangan pekerjaan dari sektor perikanan” ujar Wakil Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri). Dalam upaya mencapai pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan yang menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di seluruh Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan kemudian diubah dari 9 WPP menjadi 11 WPP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Suhelmi dan Purbani, 2013; Hozairi et al, 2019).

Diantara 11 WPP (Wilayah Pengembangan Perikanan) yang tersebar di Indonesia, tiga darinya atau sekitar 28% dari Wilayah Pengembangan Perikanan berlokasi di provinsi Maluku yakni WPP-RI 714, WPP-RI 715, dan WPP-RI 718. Potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia adalah sebesar 9,931 juta ton per tahun dengan potensi tertinggi terdapat di WPP 718 (Laut Arafura) sebesar 1,992 juta ton/tahun (20%) di Maluku. Sehingga tidak salah jika wilayah dengan Luas mencapai 712.479,65 km² dimana 666.139,85 km² (93,5%) merupakan wilayah lautan ini telah dicanangkan sejak lama menjadi lumbung ikan nasional. Mantan presiden SBY telah mencanangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional sejak acara perayaan puncak sail Banda 2010 (Kompas, 2010). Namun, di awal tahun 2017 (cnnindonesia.com, 2017) presiden Jokowi kembali hadir dengan wacana yang sama yakni untuk berencana menjadikan Maluku sebagai Lumbung ikan nasional. Artinya, sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 program M-LIN (Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional) masih sebatas wacana. Bahkan sampai sekarangpun, berdasarkan keterangan salah seorang dosen Perikanan dan Ilmu kelautan di Ambon bahwa belum ada langkah dan upaya nyata dalam mewujudkan wacana program M-LIN tersebut seperti membangun armada semut, pelabuhan-pelabuhan, maupun lokasi penyimpanan hasil tangkap yang memadai.

Terkendala dengan berbagai hal, kini wacana program M-LIN diancam kesiapan ekologis dengan banyaknya penangkapan ikan yang dilakukan dengan alat tidak ramah lingkungan (berbahaya). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Kecamatan Pulau Haruku di

Maluku, masih banyak warga yang mencari ikan di laut dengan menggunakan alat peledak rakitan demi mendapat hasil tangkap berlimpah dengan cara instan. Metode seperti ini tentu mengancam ketersediaan potensi maritim di Maluku karena mengganggu ekosistem hayati laut dan bahkan berpotensi menggagalkan wacana M-LIN.

Penangkapan dengan alat berbahaya kini semakin menjamur setelah merenggangnya kearifan lokal *sasi*. *Sasi* adalah seperangkat norma, adat, aturan, dan sanksi mengenai larangan pengambilan hasil tanaman/tumbuh-tumbuhan, ikan, dan hewan buruan sebelum waktu yang telah disepakati/ditetapkan oleh pimpinan dan tokoh masyarakat bersama warga masyarakat (*kewang* dan gereja/mesjid) dengan tujuan konservasi (Pattinama, 2009; Persada, 2018). *Sasi* laut (konservasi hasil laut) biasanya diberlakukan oleh desa adat (*negeri*) yang ada di Maluku dengan memberi tanda di kawasan tertentu untuk hasil laut tertentu seperti beberapa jenis ikan, kerang, maupun hasil laut lainnya (Betaubun et al, 2019). Dengan berlakunya *sasi* maka penduduk setempat tidak bisa melakukan aktifitas penangkapan pada wilayah tersebut hingga status *sasi* dicabut oleh perangkat adat desa (*saniri* dan *kewang*). Penangkapan dengan alat berbahaya maupun dalam jumlah yang berlebihan juga tidak diperbolehkan. Oleh salah satu masyarakat Maluku, diterangkan bahwa dulu sebagian besar desa adat yang ada di Maluku melakukan *sasi* dan hal ini sangat dihormati oleh masyarakat setempat dikarenakan tunduk kepada aturan adat. Namun cukup disayangkan, kearifan lokal *sasi* yang unik tersebut kini mulai pudar. Areal *sasi* semakin berkurang sehingga pengrusakan ekosistem laut semakin sulit dibendung dan akibatnya wacana program M-LIN semakin jauh untuk dijangkau.

Tabel 1. Analisis SWOT KODAM 4.0

<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>	<i>Opportunity</i>	<i>Threats</i>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Maluku memiliki potensi ikan <input type="checkbox"/> yang melimpah ditandai dengan <input type="checkbox"/> adanya 3 dari 11 WPP di Maluku <p>Kearifan lokal <i>sasi</i> mampu menjaga biota laut layaknya inkubator alami Masyarakat Maluku masih memiliki hubungan adat yang kental</p>	<p>Kearifan lokal <i>sasi</i> berangsur memudar sehingga masyarakat mulai marak menggunakan alat tangkap ikan berbahaya demi hasil instan yang cukup melimpah</p>	<p>Berpeluang menjadi Lumbung ikan nasional apalagi sudah diwanakan dua kali oleh presiden RI</p>	<p>M-LIN (Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional) terus menjadi wacana pemerintah dan semakin tidak mungkin dengan kerusakan ekologis yang terjadi</p>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan serta menawarkan sebuah solusi melalui gagasan program KODAM 4.0 (Kolaborasi Desa Adat, Karang Taruna, dan Pemda): Strategi Optimalisasi Potensi Kearifan Lokal *Sasi* sebagai *Branding* Provinsi Maluku guna Mensukseskan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional di Era Revolusi 4.0. Tujuannya ialah untuk mengoptimalkan kearifan lokal *sasi* yang ada di Maluku guna mensukseskan program M-LIN (Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional). Menjadikan kearifan lokal *sasi* sebagai branding provinsi Maluku berarti menggiring opini publik untuk menempatkan kearifan lokal *sasi* sebagai simbol atau tanda yang melekat pada provinsi Maluku. Sehingga setiap kali mendengar kata Maluku, akan terlintas dalam opini publik tentang kearifan lokal *sasi*. Dengan demikian diharapkan mampu mensukseskan program M-LIN terkhusus di tengah era revolusi industri 4.0 yang syarat teknologi ini. Tabel 1 menunjukkan analisa SWOT terhadap kondisi masyarakat Maluku yang mendukung adanya program KODAM 4.0.

II. KODAM 4.0

2.1. Sintesa

Sesuai dengan namanya KODAM 4.0 (Kolaborasi Desa Adat, Karang Taruna, dan Pemda) merupakan sebuah formulasi strategi yang melibatkan beberapa pihak dalam rangka mengoptimalkan kearifan lokal *sasi* yang ada di Maluku serta mensukseskan program M-LIN. Diperlukan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam KODAM (Gambar 1).

1. Pemda (Pemerintah Daerah)

Melihat potensi kearifan lokal *sasi* yang mampu berfungsi layaknya konservasi dan inkubator sederhana bagi biota laut, maka perlu dilakukan pengoptimalan terhadap hal ini. Apalagi kearifan lokal *sasi* yang dulu sangat masif di Maluku, namun dengan alasan tertentu sekarang telah menurun. Maka dari itu sangat mungkin untuk kembali seperti sebelumnya.

Pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi khusus yang mampu mendorong dilakukannya kembali *sasi* dibawah naungan adat melalui peraturan daerah yang menyatakan bahwa setiap desa adat (*negeri*) wajib memiliki areal *sasi* dengan luas minimum tertentu. Tidak hanya regulasi, dikarenakan kearifan lokal *sasi* diarahkan sebagai *branding* provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional, maka publikasi merupakan hal yang vital.

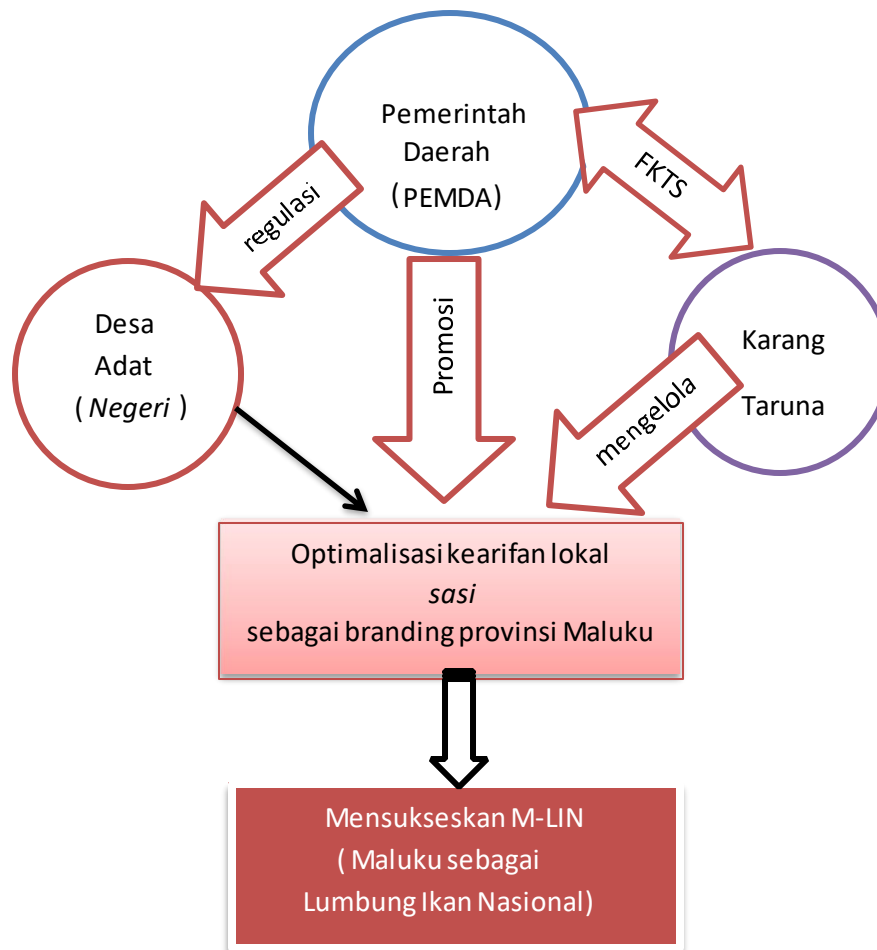
Oleh karena itu, Pemda (Pemerintah Daerah) melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku juga bertanggung jawab untuk mempromosikan atau mengenalkan kearifan lokal *sasi* baik di internal provinsi Maluku, di kancah nasional, maupun internasional. Beberapa langkah taktis yang dapat dilakukan ialah menggunakan instrumen *Instagram Ads* (ig khusus pengiklanan dengan jangkauan publikasi yang lebih tersegmentasi secara jelas), *Website*, serta *Youtube* yang secara khusus sebagai media publikasi yang dikelola secara serius dan terus di-update tentang kearifan lokal *sasi* yang sedang digarap.

Kearifan lokal *sasi* bisa dipromosikan sebagai bentuk konservasi adat yang ada di Maluku guna mensukseskan program M-LIN. Langkah ini merupakan usaha *branding* kearifan lokal *sasi* di provinsi Maluku. Kearifan lokal *sasi* dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara khususnya saat festival buka *sasi*, dimana setiap warga desa memanen biota laut *sasi* secara beramai-ramai namun tetap dalam jumlah yang sewajarnya dan dengan alat tangkap sederhana. Kearifan lokal *sasi* juga dapat dijadikan lokasi penelitian dan pengembangan biota laut tertentu melalui kerja sama dengan desa pemilik *sasi*, serta dapat dijadikan tujuan *study tour* siswa untuk belajar tentang kearifan lokal maupun konservasi dan hal-hal lainnya. Informasi di atas akan diinfokan melalui media publikasi. Tidak hanya itu, segala informasi lainnya seperti spesifikasi biota laut yang menjadi objek *sasi* setiap desa, waktu diberlakukannya *sasi* hingga ke festival buka *sasi* juga akan tertera jelas melalui akun publikasi *sasi*. Media publikasi di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku dimaksudkan agar Pemda menjadi lebih mudah dalam memantau perkembangan serta lebih jelas pertanggung-jawaban pengelolaan *sasi* ini. Dari segi pembiayaan awal serta persoalan lain terkait keuangan dari program ini juga langsung ditangani oleh Pemda melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku hingga ke distribusi insentif kepada karang taruna yang bertugas.

2. Desa adat (*negeri*)

Melalui regulasi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka desa adat (*negeri*) berkewajiban untuk melaksanakannya. Perangkat adat desa (*saniri*) serta *kewang* berkewajiban menegakan aturan ini di desa masing masing. *Saniri* serta *kewang* berperan dalam membuka dan menutup *sasi* sesuai dengan adat setiap *negeri* berdasarkan perhitungan masing-masing.

Sasi laut merupakan aturan adat yang melarang pengambilan biota laut tertentu di lokasi yang telah ditentukan dalam kurun waktu yang biasanya telah diperhitungkan oleh *saniri* maupun *kewang*. Melalui *sasi*, ikan dan biota laut lainnya hanya akan ditangkap saat sudah memasuki usia panen, sehingga dapat memaksimalkan masa pemijahan dan alhasil potensi ikan di areal *sasi* menjadi lebih besar. Penghitungan kurun waktu *sasi* akan dilakukan oleh *saniri* maupun *kewang* dan dipadukan dengan perhitungan ilmiah dari dosen maupun tenaga ahli lainnya melalui kerja sama dengan Pemda (Pemerintah Daerah).



Gambar 1. Keterkaitan Berbagai Pihak yang terlibat dalam KODAM 4.0

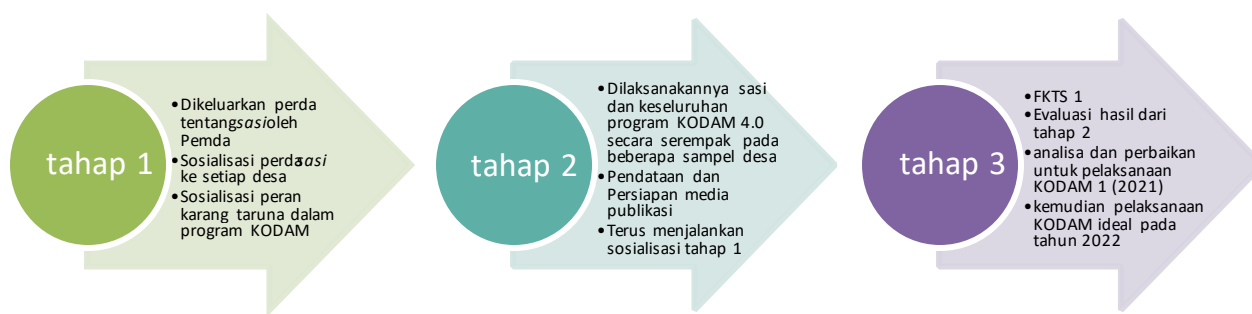
3. Karang Taruna

Karang taruna di setiap desa adat bertugas untuk mengelola *sasi* yang ada. Setiap penelitian, *study tour*, wisata, maupun kepentingan lainnya yang berhubungan dengan *sasi* akan berada di bawah manajerial karang taruna desa. Seluruh karang taruna ini akan tergabung dalam sebuah forum regional se-provinsi Maluku yakni FKTS (Forum Karang Taruna *Sasi*) yang merupakan agenda tahunan karang taruna desa adat yang mengelola *sasi*. Forum ini berisi pelatihan dari Pemda untuk mengembangkan *sasi* lebih jauh, pembahasan mengenai aspirasi

masyarakat terkait *sasi*, serta pertanggungjawaban dalam satu periode (1 tahun) selama mengelola *sasi* desanya.

Melalui program kolaborasi ini, diharapkan para pemuda Maluku (karang taruna) dapat lebih mengenal kearifan lokal yang ada, mencintai lingkungan melalui nilai-nilai konservasi yang tertuang dalam kearifan lokal *sasi*, serta berinovasi untuk mengembangkan potensi-potensi lokal dari Maluku khususnya kearifan lokal *sasi* untuk bersama mensukseskan program M-LIN.

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mempertahankan eksistensi kearifan lokal *sasi* maupun menjaga potensi maritim di Maluku dari penggunaan alat berbahaya. KODAM adalah salah satu cara yang memadukan kedua hal tersebut yang merupakan sebuah program dengan tujuan membranding provinsi Maluku melalui kearifan lokal *sasi* guna mensukseskan program M-LIN (Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional). Namun sesuai dengan namanya KODAM merupakan sebuah kolaborasi sehingga peran dari setiap pihak sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program ini (Gambar 2).



Gambar 2. Estimasi Pelaksanaan KODAM

III. Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

KODAM adalah salah satu ide dan sintensa berbasis eksistensi kearifan lokal. Dasar aktifitasnya adalah pelaksanaan “*sasi*” yang telah menjadi budaya di Maluku. KODAM akan mejadi program yang menambahkan keunggulan Maluku sebagai lumbung Ikan Nasional (M-LIN). KODAM memerlukan dukungan optimal dari seluruh komponennya dan evaluasi berkala untuk kesuksesan programnya.

3.2. Saran

KODAM di implementasikan sesuai jadwal yang disusun untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan.

Daftar Pustaka

- Ali, I. M., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 6(2).
- Betaubun, A.D.S., Laiyanan, S.E.B., Renyaan, D. and Pentury, F., 2019. Persepsi Penerapan Sasi Laut di Wilayah Perairan Kepulauan Kei: Upaya Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Laut. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12(1), pp.136-144.

- Hozairi, H., Buhari, B., Lumaksono, H., & Tukan, M. (2019). Optimasi Penentuan Jumlah Kapal Pengawas Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan–716 Menggunakan Algoritma Genetika. *NJCA (Nusantara Journal of Computers and Its Applications)*, 4(1), 35-43.
- Musyaffa, Iqbal. (2018). Kadin: Pemanfaatan potensi laut Indonesia belum maksimal. Web: www.aa.com. Diakses pada: 19 Agustus 2018.
- Kompas.com. (2010). SBY Canangkan Maluku Jadi Lumbung Ikan.
- Riyanto, Bagja. (2018). Program Gali Laut (PROGALA): Optimalisasi Peran Pemuda dalam Pemanfaatan Potensi Kemaritiman Berbasis *Sociopreneurship* untuk Mengurangi Kemiskinan di Papua [esai]. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Satya, V. E. (2018). Strategi Indonesia menghadapi industri 4.0. *Info Singkat*, 10(9), 19-24.
- Stefanie, Christie. (2017). Jokowi Bakal Tunjuk Maluku jadi Lumbung Ikan Nasional. Web: cnnindonesia.com. Diakses pada: 19 Agustus 2018.
- Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., Amri, K. (2016). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPP NRI) tahun 2015 serta opsi pengelolaannya. *J. Kebijak. Perikan. Ind*, 8(2), 97-110.
- Suhelmi, I. R., Purbani, D. (2013). Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dengan memanfaatkan WebGIS. *Depik*, 2(2).
- Pattinama, M. J. (2009). Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat). *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 13(1), 1-12.
- Persada, N.P.R., Mangunjaya, F.M., Tobing, I.S., 2018. Sasi sebagai budaya konservasi sumber daya alam di kepulauan Maluku. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(59).